

**PERUBAHAN RENCANA  
KERJA (RENJA)  
TAHUN 2024**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja (Renja)) Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Dinas Sosial dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Dinas Sosial yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat.

Akhir kata, dokumen Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 ini semoga dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**KHAIRUL HAPAHAP, S.Sos M.Si**  
**NIP. 19680626 198911 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)     SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....</b>	<b>7</b>
2.1. evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial sampai Triwulan II .....	7
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...</b>	<b>12</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial .....	12
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .....	13
3.3. Program dan Kegiatan.....	16
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD sampai Triwulan II Tahun Berjalan .....	8
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial menyusun Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

### **2.1 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, maka landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organissi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **b) Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II

BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
	3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TRIWULAN II**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial sampai Triwulan II**

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial sampai Triwulan II Tahun 2024**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra tahun 2024-2026)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)		11=(10/4)
10601	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100	%								
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen					4	Dokumen		
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen					2	Dokumen		
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen					2	Dokumen		
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan					1	Laporan	1	Laporan 100%
	202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	204	orang					204	orang	85	orang 42%



2					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik yang disediakan	3	Laporan							3	Laporan			0%
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan							1	Laporan			0%
			2	09		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
2					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	Unit							6	Unit	3	unit	50%
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23	Unit							23	Unit			
1	06	02				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PMKS YANG DIBERDAYAKAN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>							<b>100</b>	<b>%</b>			
		02	2	03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Pelatihan Keterampilan</b>													
					02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	orang							12	orang	8	orang	67%
					03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	keluarga							5	keluarga	2	keluarga	40%
1	06	04				<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase (%) Panti sosial skala Kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</b> <b>Persentase (%) Panti sosial skala Kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</b>	<b>100</b>	<b>%</b>							<b>100</b>	<b>%</b>			

			0 4	2	0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	%								100	%			
					0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	orang								20	oran g	20	orang	100%
1	0 6	0 5				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang menerima bantuan</b>	100	%								100	%			0%
				2	0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PMKS yang menerima bantuan	100	%								100	%			0%
					0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5.000	keluarga								5.00 0	kelu arga	2000	orang	40%
1	0 6	0 6				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana</b>	100	%								100	%			0%
				2	0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	%								100	%			0%
					0 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang								30	oran g	12	orang	40%
					0 2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang								30	oran g	12	orang	40%

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial.**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dimana tahun 2024 merupakan tahun awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

##### **Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggabungkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.

## 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isu strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, dari tujuan dan sasaran tersebut Dinas Sosial mengacu kepada Tujuan 1 "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih" dengan sasaran 1 "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima, dengan demikian Tujuan dan sasaran Dinas Sosial diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan yang prima bidang Sosial	Pencapaian SPM Bidang Sosial	Persen	100%	100%	100%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial	Nilai	65,52	70,52	75,52
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial	Nilai	89,50	91,50	93,50
			Persentase Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Bantuan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar	persen	87,32	88,82	90,32

### 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran Nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 sebagai berikut yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 juga memperhatikan arah dan Prioritas Pembangunan Nasional yang mengutamakan pembangunan infrastruktur (konektivitas), kedaulatan pangan dan kemaritiman. Prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
2. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.
5. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.
6. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.
7. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.
8. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.
9. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Sosial dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa urusan pemerintahan bidang sosial. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.3**  
**Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2024**  
**Dinas Sosial**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/B ERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.239.827.058	3.166.805.038	- 73.022.020
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.239.827.058	3.166.805.038	- 73.022.020
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai AKIP</i>	<i>Nilai AKIP</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	CC Predikat	CC Predikat	2.672.450.758	2.183.574.138	- 488.876.620
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 dokumen	4 dokumen	34.054.400	22.102.800	- 11.951.600
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 Dokumen	4 Dokumen	8.513.600	5.532.000	- 2.981.600
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Dokumen	2 Dokumen	8.513.600	5.523.600	- 2.990.000
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Dokumen	2 Dokumen	8.513.600	5.523.600	- 2.990.000
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	8.513.600	5.523.600	- 2.990.000
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b><i>persentase realisasi anggaran Dinas Sosial</i></b>	<b><i>persentase realisasi anggaran Dinas Sosial</i></b>			<b>93 persen</b>	<b>93 persen</b>	<b>1.969.904.758</b>	<b>1.612.288.738</b>	<b>- 357.616.020</b>
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	1.958.881.458	1.607.775.138	- 351.106.320
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	4.513.600	4.513.600	-
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	6.509.700	-	- 6.509.700

1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial</i>	<i>jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 orang	1 orang	8.364.000	-	- 8.364.000
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Perlengkapannya									
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Orang	1 Orang	8.364.000	-	- 8.364.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen ketatausahaan d</i>	<i>Jumlah dokumen ketatausahaan d</i>			3 dokumen	3 dokumen	132.656.100	263.086.500	130.430.400
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	6 paket	6 paket	6.686.100	4.035.700	- 2.650.400
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	6 paket	6 paket	28.781.500	40.958.600	12.177.100
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		<i>Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	22 paket	22 paket	6.745.200	9.707.900	2.962.700
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	700 Paket	700 Paket	6.009.600	10.136.000	4.126.400
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4000 Paket	4000 Paket	6.989.700	10.225.100	3.235.400
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	7 Dokumen	7 Dokumen	16.470.000	16.470.000	-
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100 Laporan	100 Laporan	60.974.000	171.553.200	110.579.200
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah jasa penunjang urusan pemerintahan</b>					12.674.800	10.049.500	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	5 Unit	5 Unit	12.674.800	10.049.500	- 2.625.300
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>			<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>413.380.000</b>	<b>169.005.400</b>	<b>- 244.374.600</b>
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	7.900.000	4.900.000	- 3.000.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3 Laporan	3 Laporan	75.990.000	58.590.000	- 17.400.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	329.490.000	105.515.400	- 223.974.600
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>jumlah pemeliharaan barang</i></b>	<b><i>jumlah pemeliharaan barang</i></b>			<b>19 unit</b>	<b>19 unit</b>	<b>101.416.700</b>	<b>107.041.200</b>	<b>5.624.500</b>
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	23 Unit	23 Unit	94.859.200	100.341.200	5.482.000
1.06.01.2.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	22 Unit	22 Unit	6.557.500	6.700.000	142.500
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b><i>Persentase PMKS yang diberdayakan</i></b>	<b><i>Persentase PMKS yang diberdayakan</i></b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>140.644.000</b>	<b>74.707.600</b>	<b>- 65.936.400</b>
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b><i>Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Pelatihan Keterampilan</i></b>	<b><i>Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Pelatihan Keterampilan</i></b>			<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>140.644.000</b>	<b>74.707.600</b>	<b>- 65.936.400</b>
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							140.644.000	74.707.600	
		<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 Orang	12 Orang	15.790.000	25.780.000	9.990.000
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									-

		<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	5 Keluarga	5 Keluarga	124.854.000	48.927.600	- 75.926.400
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b><i>Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan pembangunan</i></b>	<b><i>Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan pembangunan</i></b>			<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>96.732.300</b>	<b>405.923.900</b>	<b>309.191.600</b>
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
		<i>Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	20 Orang	20 Orang	96.732.300	405.923.900	309.191.600
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	20 Orang	20 Orang	96.732.300	405.923.900	309.191.600

1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	Persentase PMKS yang menerima bantuan			100 %	100 %	48.395.000	334.395.000	286.000.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PMKS yang menerima bantuan	jumlah PMKS yang menerima bantuan			5000 Keluarga	5000 Keluarga	48.395.000	334.395.000	286.000.000
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Di data	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kot	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0	100 Orang	-	290.000.000	290.000.000
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kot	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kot	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	5000 Keluarga	5000 Keluarga	48.395.000	44.395.000	- 4.000.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana			30 Orang	30 Orang	281.605.000	168.204.400	- 113.400.600
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					281.605.000	168.204.400	- 113.400.600
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	30 Orang	30 Orang	270.208.000	156.807.800	- 113.400.200
1.06.06.2.01.0002	Pelayanan Dukungan Psikososial									

		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	30 Orang	30 Orang	11.397.000	11.396.600	-	400
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------	----------	------------	------------	---	-----

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradat.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**KHAIRU HARAHAP, S.Sos M.Si**

**NIP. 19680626 198911 1 001**